

ADK, UBK, DAN POTENSI EKONOMI LOKAL: STUDI KASUS DI KABUPATEN KUTAI BARAT

Hermada Dekiawan

Akademi Akuntansi YKPN

Email: *hermada_dekiawan@yahoo.com*

ABSTRACT

This paper discusses the problems of Village Fund Allocation (ADK) and Village Joint Venture (UBK) relation to the potential of local economies in West Kutai District (Kubar). ADK and UBK is one of the components derived from the policy of the Village Fund Allocation (ADD) as set forth in the Act and Regulation of the Minister. In both these legal products, ADD requires local governments to allocate funds for community empowerment sebaian village, with several criteria. However, in practice the policy of ADD cause multiple interpretations, so that the order to each region has different implementations in the policy of ADD, including Kubar. In this paper, will study the implementation of ADK / UBK Kubar relation to local economic potential. Local economic potential Kubar identified by using the weighting, so that the condition information is obtained, which are classified into 3 groups: developed, developing, and growing. The study shows that policies ADK / UBK did not refer to the criteria of the area, so the impact ADK / UBK in economic development Kubar not optimal. On the basis of this, the policy ADK / UBK needs to be associated with the potential of the region, to be more effective in promoting community economic empowerment.

Keywords: ADK, UBK, Kutai Barat, Local Economic Development

PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi haruslah menempatkan penduduk sebagai subyek sekaligus obyek. Penempatan penduduk sebagai subyek mengandung arti bahwa imlementasi pembangunan ekonomi diharuskan mampu melibatkan penduduk sebagai pelaksana pembangunan, di samping pemerintah daerah sebagai perencana dan pelaksana. Penempatan penduduk sebagai obyek mengandung arti bahwa pembangunan ekonomi diarahkan pada kesejahteraan penduduk.

Menurut Tjiptoherijanto (2002), keterkaitan penduduk dan pembangunan ekonomi mengandung pemikiran penting. Pertama, kependudukan, atau dalam hal ini adalah penduduk, merupakan pusat dari seluruh kebijaksanaan dan program pembangunan yang dilakukan. Pembangunan baru dikatakan berhasil jika mampu meningkatkan kesejahteraan penduduk dalam arti yang luas. Kedua, keadaan dan kondisi kependudukan yang ada sangat mempengaruhi dinamika pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Jumlah penduduk yang besar jika diikuti dengan kualitas penduduk yang memadai akan merupakan pendorong bagi pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya

jumlah penduduk yang besar jika diikuti dengan tingkat kualitas yang rendah, menjadikan penduduk tersebut sebagai beban bagi pembangunan. Ketiga, dampak perubahan dinamika kependudukan baru akan terasa dalam jangka yang panjang. Karena dampaknya baru terasa dalam jangka waktu yang panjang, sering kali peranan penting penduduk dalam pembangunan terabaikan.

Peran aspek kependudukan dalam pembangunan ekonomi daerah dapat dilihat dari implementasi kebijakan ekonomi daerah. Di Kabupaten Kutai Barat, dalam rangka memperluas peran penduduk dalam pembangunan ekonomi, pemerintah daerah membuat kebijakan Alokasi Dana Kampung (ADK) dan Usaha Bersama Kampung (UBK). ADK dan UBK merupakan salah satu wujud implementasi pemberdayaan penduduk dalam pembangunan ekonomi daerah di Kabupaten Kutai Barat, sebagai salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan tersebut merupakan bentuk implementasi dari Alokasi dana Desa (ADD) seperti yang tertuang dalam UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 25 Tahun 1999. Dalam UU tersebut tidak secara eksplisit mengatur perimbangan keuangan yang terformulasi kepada desa. Desa hanya menerima bantuan keuangan dari pemerintah, provinsi, dan kabupaten. Hal ini menjadikan munculnya multitafsir dari setiap kabupaten, sehingga tidak semua daerah menggunakan istilah alokasi dana desa (ADD).

Setiap daerah memiliki peraturan yang mengatur tentang mekanisme implementasi dari ADD. Beberapa daerah menggunakan bobot penentuan besarnya alokasi ADD untuk setiap desa, sehingga jumlah yang diterima untuk tiap desa tidak sama, karena ditentukan oleh: (1) luas wilayah, (2) jumlah penduduk, (3) kondisi geografis, dan (4) pertumbuhan ekonomi desa. Di sisi lain, beberapa daerah yang lain menggunakan mekanisme “pukul rata”, sehingga bagaimanapun kondisi di desa, setiap desa akan menerima dalam jumlah yang sama, sebagaimana yang terjadi di Kabupaten Kutai Barat. Studi yang dilakukan oleh Eko dari IRE (2008) menunjukkan bahwa dari berbagai daerah yang mengimplementasikan secara beragam tentang ADD, sebagian besar daerah menggunakan bobot yang besar dalam ukuran nominal (luas wilayah dan jumlah penduduk), indikator keterjangkauan dan kemiskinan menempati urutan kedua, indikator potensi desa dan PBB menempati urutan ketiga. Indikator pelayanan publik dasar (kesehatan, pendidikan, transportasi, air bersih, dan lain-lain) tampak belum dijadikan sebagai indikator utama. Lebih lanjut disampaikan sulitnya menjadikan indikator pelayanan publik sebagai indikator utama disebabkan karena sulitnya menentukan pola pengukuran disamping pelayanan publik masih menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten.

Sebenarnya kebijakan ADD diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 37 Tahun 2007. Dalam peraturan tersebut dinyatakan secara jelas tentang wewenang desa dalam membuat perencanaan pembangunan desa, implementasi kebijakan, monitoring dan evaluasi, serta aturan mengenai alokasi dana untuk setiap desa. Dijelaskan dalam peraturan tersebut bahwa besarnya ADD adalah minimal 10% dari APBD, dengan model alokasi terdiri dari dua azas, yaitu azas merata dan azas adil. Azas merata merupakan bagian dari ADD yang diberikan secara merata untuk setiap desa, sedangkan azas adil mempertimbangkan bobot tertentu dari setiap desa.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 37 Tahun 2007 dinyatakan bahwa tujuan dari ADD pada intinya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai aktivitas sosial ekonomi secara gotong royong, dengan melibatkan swadaya masyarakat. Dari uraian tersebut, ADD dimaksudkan sebagai “stimulus” bagi desa dalam mengembangkan berbagai aktivitas sosial ekonomi kemasyarakatan. Melihat tujuan dari ADD, tersirat harapan pemerintah bahwa ADD menjadi “modal” bagi masyarakat desa untuk mengembangkan desa secara lebih baik.

Salah satu hal yang bisa dilaksanakan desa dengan ADD adalah pengembangan usaha kecil, yang diharapkan mampu memberikan *multiplier effect* kepada masyarakat melalui aktivitas ekonomi.

Penggunaan ADD untuk pengembangan ekonomi kerakyatan merupakan salah satu cara meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut, peran pemerintah kabupaten menjadi sangat penting. Peran penting tersebut bukan semata tentang besarnya alokasi dana, namun secara lebih jauh juga menyangkut kelanjutan dari pengelolaan ADD agar betul-betul berdampak luas bagi masyarakat desa.

Beberapa studi yang dilakukan oleh berbagai lembaga menunjukkan bahwa tidak semua ADD mampu memenuhi tujuan yang diharapkan. Untuk itu, mekanisme pembinaan pemerintah kabupaten serta mekanisme monitoring dan evaluasi menjadi hal yang sangat penting. Menurut studi Eko (2008), permasalahan yang muncul dalam ADD kaitannya dengan pembangunan desa adalah ketidaksinkronan antara pembangunan desa dengan pembangunan daerah. Hal ini menjadikan efisiensi dan efektivitas ADD sering tidak sesuai dengan yang diharapkan karena kurang sejalan dengan pembangunan daerah secara makro.

Kebijakan daerah terutama kebijakan pembangunan ekonomi daerah menurut Munir (2008) pada hakekatnya merupakan proses yang mana pemerintah daerah atau kelompok berbasis komunitas mengelola sumberdaya yang ada dan masuk ke dalam penataan kemitraan baru dengan sektor swasta, atau diantara mereka sendiri, untuk menciptakan pekerjaan baru dan merangsang kegiatan ekonomi wilayah. Lebih lanjut dikatakan bahwa ciri utama pengembangan ekonomi adalah *endogenous development* yang menggunakan potensi sumberdaya manusia, institusional, dan fisik. Hal ini, menurut Blakely (1989) akan mengarahkan daerah pada penciptaan lapangan kerja baru dan merangsang pertumbuhan kegiatan ekonomi.

Lebih lanjut Blakely (1989) antara lain menyatakan bahwa dalam paradigma pembangunan ekonomi daerah yang baru, pemerintah daerah melalui perusahaan yang ada diarahkan untuk mengembangkan kegiatan ekonomi yang sesuai dengan penduduk setempat. Selain itu, basis pembangunan tidak difokuskan pada pembangunan sektor ekonomi, namun pada kelembagaan ekonomi yang baru.

LINGKUP DAN TUJUAN STUDI

Lingkup Studi

Lingkup studi meliputi kajian tentang analisis pengaruh instrumen kebijakan pemerintah Kabupaten Kutai Barat (Kubar) kaitannya dengan ADD (yang selanjutnya disebut dengan Alokasi Dana Kampung atau ADK), dalam rangka pemberdayaan masyarakat kampung melalui Usaha Bersama Kampung (UBK) dan Usaha Kecil Menengah (UKM). Untuk itu, studi ini juga akan membahas analisis perekonomian Kubar secara makro, yang dikaitkan pula dengan pemberdayaan ekonomi kerakyatan. Tujuan Studi

1. Mengetahui kondisi perekonomian daerah Kubar yang dikaitkan dengan usaha pemerintah Kubar dalam pemberdayaan ekonomi kerakyatan
2. Memberikan gambaran tentang pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui ADK, UBK, dan UKM di Kabupaten Kubar.
3. Memberikan gambaran efisiensi dan efektivitas instrumen kebijakan daerah dalam pemberdayaan ekonomi kerakyatan.
4. Memberikan pemetaan secara makro kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagai dampak kebijakan ekonomi daerah.

METODOLOGI STUDI

Tahapan Studi

Langkah-langkah yang dilakukan dalam studi ini meliputi hal-hal berikut:

1. Mengumpulkan data sekunder yang berkaitan dengan Kubar, yang meliputi data wilayah, kependudukan, ketenagakerjaan, data dan informasi yang berkaitan dengan ADK/UBK, serta data makroekonomi.
2. Menganalisis data yang terkumpul secara deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan statistika.
3. Mengolah data-data yang berkaitan dengan makroekonomi untuk pemetaan potensi ekonomi.

Tahapan Analisis Pemetaan Potensi Ekonomi

Dalam melakukan pemetaan potensi ekonomi dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Penentuan Indikator

Dalam hal ini, akan ditentukan indikator yang menunjukkan besarnya potensi wilayah. Indikator yang dipergunakan meliputi (1) indikator aktivitas ekonomi masyarakat yang meliputi sub indikator: banyaknya hotel/penginapan; banyaknya lokasi pasar, pertokoan, dan minimarket; banyaknya warung kelontong dan warung makan, serta banyaknya restoran dan koperasi. Semakin banyak indikator-indikator tersebut menunjukkan semakin banyaknya aktivitas ekonomi masyarakat, (2) indikator sosial ekonomi masyarakat yang meliputi sub indikator: pendidikan; kesehatan; penerangan; kondisi bangunan; kesejahteraan keluarga; serta tingkat kepadatan penduduk, (3) indikator potensi sumber daya alam wilayah yang meliputi sub indikator: luas areal; produksi hasil perkebunan; produksi ternak, perikanan, dan produksi padi.

2. Penentuan Bobot

Masing-masing indikator kemudian diberi bobot. Pemberian bobot dimaksudkan agar diperoleh gambaran tingkat kepentingan masing-masing indikator. Berdasarkan tujuan bahwa pemetaan wilayah dimaksudkan untuk mengetahui aktivitas ekonomi masyarakat kaitannya dengan dana UBK/ADK, maka indikator aktivitas ekonomi masyarakat diberi bobot paling tinggi yaitu 50%. Selanjutnya indikator sosial ekonomi masyarakat diberi bobot 20% karena indikator ini menggambarkan aspek sosial ekonomi, yang tingkat relevansinya tidak sedekat dengan indikator sebelumnya, kemudian indikator potensi sumber daya alam wilayah diberi bobot 30% karena indikator ini memiliki keterkaitan erat dengan UBK/ADK, yang diharapkan mampu mengoptimalkan peran sumberdaya alam wilayah sebagai stimulator aktivitas ekonomi masyarakat. Masing-masing indikator memiliki beberapa sub indikator sebagaimana yang telah disebutkan di atas. Sub-sub indikator tersebut dikelompokkan menjadi 3 predikat, yaitu: baik (dengan bobot 5), cukup baik (dengan bobot 3), dan kurang (dengan bobot 1). Penentuan predikat didasarkan pada perbandingan relatif antar wilayah, dengan memperhatikan data tertinggi, terendah, rata-rata hitung (mean), serta simpangan baku (standard deviation) yang menggambarkan penyebaran data. Nilai rata-rata \pm simpangan baku dijadikan sebagai dasar penentuan predikat.

3. Penghitungan Akhir

Setelah masing-masing sub indikator di setiap wilayah diberi predikat berdasarkan masing-masing kriteria, selanjutnya nilai predikat masing-masing sub indikator di setiap wilayah dijumlahkan. Hasil penjumlahan tersebut selanjutnya dikalikan dengan bobot indikator. Hasil akhir untuk setiap wilayah selanjutnya dirangking. Dari hasil rangking kemudian dihitung data tertinggi, data terendah, rata-rata hitung, serta simpangan baku, sebagai dasar untuk mengklasifikasikan wilayah ke dalam tiga kelompok: Maju, Berkembang, Tumbuh.

GAMBARAN UMUM KABUPATEN KUTAI BARAT

Wilayah dan Kependudukan

Pada tahun 2008, Kabupaten Kutai Barat memiliki 21 kecamatan dan 223 kampung. Tiga kecamatan yang paling luas berturut-turut adalah Kecamatan Long Apari (5.490,7 km²), Kecamatan Long Bagun (4.971,2 km²), serta Kecamatan Long Pahangai (3.420,4 km²). Kecamatan yang paling kecil adalah Kecamatan Sekolaq Darat (165,46 km²). Berdasarkan data jumlah kampung, Kecamatan Barong Tongkok memiliki jumlah kampung yang paling banyak (21 kampung), sedangkan Kecamatan Laham memiliki jumlah kampung yang paling sedikit (4 kampung).

Ditinjau dari jumlah penduduk, pada tahun 2008 Kabupaten Kutai Barat memiliki jumlah penduduk sebanyak 167.706 jiwa. Jumlah penduduk terbesar dimiliki oleh Kecamatan Barong Tongkok (19.960 jiwa) sedangkan jumlah penduduk terkecil dimiliki oleh kecamatan Laham (2.420 jiwa). Kecamatan Long Apari yang memiliki wilayah terluas hanya memiliki jumlah penduduk 4.405 jiwa. Apabila ditinjau dari kepadatan penduduk, Kecamatan Barong Tongkok memiliki tingkat kepadatan yang tertinggi, 40,55 penduduk per km². Tingkat kepadatan yang paling kecil adalah Kecamatan Long Apari, yaitu 0,8 penduduk per km².

Luas Wilayah Kecamatan	Jumlah (KM2)	Jumlah Rumah Kampung	Tangga	Penduduk	Rasio			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(2):(3)	(4):(3)	(2):(4)	(5):(4)
Bongan	2,274	16	2,186	8,518	142.2	136.6	1.0	3.9
Jempang	654	12	3,396	10,291	54.5	283.0	0.2	3.0
Penyinggahan	272	5	1,123	3,941	54.4	224.6	0.2	3.5
Muara Pahu	497	12	2,393	8,969	41.4	199.4	0.2	3.7
Muara Lawa	445	8	1,649	6,482	55.6	206.1	0.3	3.9
Damai	1,750	14	2,440	9,383	125.0	174.3	0.7	3.8
Barong Tongkok	492	21	5,310	19,960	23.4	252.9	0.1	3.8
Melak	288	6	2,440	10,121	48.0	406.7	0.1	4.1
Long Iram	1,462	11	2,196	7,789	132.9	199.6	0.7	3.5
Long Hubung	531	8	1,896	8,294	66.4	237.0	0.3	4.4
Long Bagun	4,971	11	1,991	8,812	451.9	181.0	2.5	4.4
Long Pahangai	3,420	11	1,304	4,772	310.9	118.5	2.6	3.7
Long Apari	5,491	10	1,193	4,405	549.1	119.3	4.6	3.7
Bentian Besar	886	9	778	2,643	98.5	86.4	1.1	3.4
Linggang Bigung	699	9	3,800	14,551	77.7	422.2	0.2	3.8
Silug Ngurai	2,016	15	1,391	5,337	134.4	92.7	1.4	3.8
Nyuatan	1,741	9	1,884	6,077	193.4	209.3	0.9	3.2
Sekolaq Darat	165	7	1,844	6,046	23.6	263.4	0.1	3.3
Manor Bulatin	868	13	2,474	8,536	66.7	190.3	0.4	3.5
Tereng	1,804	12	2,771	10,359	150.3	230.9	0.7	3.7
Laham	902	4	564	2,420	225.5	141.0	1.6	4.3

Sumber: Diolah dari Kutai Barat Dalam Angka 2008

Dari 167.706 penduduk, yang masuk dalam kategori usia kerja sebanyak 115.833 (69,06%) sedangkan 51.873 penduduk (30,94%) masuk dalam kategori bukan usia kerja menurut kriteria BPS. Dari sisi usia produktif, jumlah penduduk yang masuk dalam kelompok usia produktif sebesar 110.210 (65,71%) sedangkan 57.496 (34,29%) masuk dalam kelompok bukan usia produktif. Informasi ini memberikan gambaran tingkat ketergantungan (dependency ratio) di Kutai Barat sebesar 52,17%.

Kelompok Usia	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
0 -14	27,365	24,509	51,874
15 - 64	57,652	52,556	110,208
65 ke atas	2,967	2,657	5,624
Jumlah	87,984	79,722	167,706
Depency Ratio	52.61	51.69	52.17

Sumber: Diolah dari Kutai Barat Dalam Angka 2008

Pendidikan dan Tenaga Kerja

Apabila kependudukan dikaitkan dengan pasar tenaga kerja, jumlah pencari kerja dengan lapangan pekerjaan yang tersedia tidak sebanding. Berdasarkan data yang ada, jumlah pencari kerja yang terdaftar secara resmi menunjukkan angka 1.990 sedangkan permintaan tenaga kerja hanya 226, sehingga terdapat gap atau kesenjangan sebesar 1.764 atau 88,64%.

Perkembangan Pencari Kerja dan Permintaan Tenaga Kerja

Tingkat Pendidikan	Pencari Kerja			Permintaan Tenaga Kerja		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Tidak Tamat SD/SD	417	53	470	0	0	0
SLTP	194	27	221	0	0	0
SMA/SMK	786	283	1069	65	74	139
D-I, D-II, D-III	52	67	119	14	31	45
D-IV/Sarjana	67	44	111	22	20	42
Jumlah	1516	474	1990	101	125	226

Sumber: diolah dari Kutai Barat Dalam Angka 2008

Dari total pencari kerja, sebagian besar pencari kerja adalah mereka yang lulusan SMA/SMK yaitu sebanyak 1.069 orang (53,71%), sedangkan permintaan tenaga kerja untuk lulusan ini hanya 139 orang atau hanya 13% dari jumlah pencari kerja. Dilihat dari jenis kelamin menunjukkan bahwa pencari kerja sebagian besar adalah laki-laki (76,18%) namun permintaan tenaga kerja untuk laki-laki justru lebih kecil dibanding perempuan, yaitu hanya sebesar 44,69%. Bila ditinjau dari komposisi jumlah penduduk, proporsi jenis kelamin laki-laki lebih banyak daripada perempuan, yaitu sebesar 52,46%. Kesenjangan antara pencari kerja dan permintan tenaga kerja juga terjadi pada lulusan perguruan tinggi, baik diploma maupun sarjana. Kesenjangan untuk keduanya adalah sama, yaitu sebesar 62,2%. Hal ini mengindikasikan hanya 37,8% saja yang potensial terserap ke dunia kerja.

Tenaga kerja yang bekerja di sektor perkebunan cukup banyak. Perkebunan yang banyak menyerap tenaga kerja terutama adalah perkebunan karet (24.331), kopi (1.639), kelapa (1.435), dan kemiri (1.407). Hampir dalam semua jenis perkebunan, Kecamatan Barong Tongkok merupakan kecamatan yang memiliki tenaga kerja terbesar di sektor perkebunan.

MAKRO EKONOMI KUTAI BARAT

Pertanian dan Perkebunan

Sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan di Kabupaten Kutai Barat memiliki peran besar dalam pembangunan. Hal ini terlihat dari cukup besarnya kontribusi sektor ini dalam pembentukan PDRB. Jenis tanaman yang memiliki peran besar dalam sektor pertanian ini meliputi padi, palawija, lada, sayuran, dan buah-buahan sedangkan perkebunan meliputi perkebunan kelapa, kelapa sawit, karet, kemiri, jahe, dan aren. Hasil pertanian berupa padi pada tahun 2007 sebesar 40.768 ton. Produksi padi terbesar terdapat di Kecamatan Damai (8.175 ton), disusul kemudian Kecamatan Long Iram (5.400 ton), dan Kecamatan Long Hubung (3.100 ton). Untuk produksi tanaman palawija (jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, kedelai, dan kacang hijau), produksi terbesar sepanjang tahun 2003-2007 adalah ubi kayu, yaitu rata-rata sebanyak 12.619,25 ton per tahun. Produksi sayur-sayuran di Kutai Barat masih didominasi oleh komoditi kacang panjang, cabe, terung, bayam, dan ketimun dengan produksi semuanya di atas 1 ton. Untuk buah-buahan, yang memiliki produksi di atas 1 ton meliputi duku (14,907 ton), durian (6,067 ton), jeruk siam (1,081 ton), nangka/cempedak (5,618 ton), nanas (3,904 ton), pisang (5,106 ton), dan rambutan (4,129 ton).

Dalam sektor perkebunan, Kecamatan Barong Tongkok merupakan kecamatan yang memiliki potensi besar karena memiliki hampir semua jenis tanaman perkebunan, sektor mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang cukup besar. Dari semua jenis perkebunan, perkebunan karet merupakan jenis perkebunan yang menyerap tenaga kerja paling banyak, dan terus meningkat setiap tahun. Dari total area perkebunan di Kutai Barat yang luasnya mencapai 38.943,58 ha, sebagian besar yaitu seluas 33.427 ha merupakan perkebunan karet.

Dilihat dari sisi luasnya, Kecamatan Barong Tongkok memiliki area terluas untuk perkebunan karet (7.728 ha) dengan produksi terbanyak (8.325 ton). Namun, dari tinjauan produktivitas menunjukkan bahwa produktivitas lahan tertinggi terjadi pada Kecamatan Long Pahangai (11.026,67 kg/ha). Informasi lebih jauh dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Kecamatan	Luas Areal (Ha)	Produksi (ton)	Produktivitas (Kg/Ha)	Jumlah Tenaga Kerja (TK)	Produktivitas Tenaga Kerja (ton/TK)
Melak	1330.5	1911	1735.69	981	1.95
Barong Tongkok	7728	8325	1768.64	7331	1.14
Muara Lawa	1707	540	384.84	988	0.55
Damai	1208.5	908.95	1631.87	830	1.10
Linggang Bigung	2883	4909.7	2160.97	2845	1.73
Jempang	1308	1479.3	1938.79	687	2.15
Penyinggahan	140	2.62	47.64	74	0.04
Bongan	1205	1264	1984.3	965	1.31
Muara Pahu	454.5	844.07	2813.57	383	2.20
Bentian Besar	560	1115.5	2425	390	2.86
Long Iram	644	538	945.52	544	0.99
Long Hubung	486	5	47.62	250	0.02
Long Bagun	335	3	11.74	167	0.02
Long Pahangai	31	165.4	11026.67	16	10.34
Long Apari	85	4.48	99.56	40	0.11
Laham	60	10	1111.11	30	0.33
Tereng	1536	1300.5	1083.75	463	2.81
Nyuatan	1391.5	720	1712.25	435	1.66
Manor Bulatn	5323	2052.4	786.66	1843	1.11
Silug Ngurai	290	292.8	2091.43	100	2.93
Sekolaq Darat	4721	3760	1053.81	4691	0.80
JUMLAH	33427	30152	36861.43	24053	1.25

Sumber: Diolah dari Kutai Barat dalam Angka 2008

Data di atas menunjukkan adanya perbedaan di masing-masing kecamatan untuk bidang pertanian dan perkebunan dalam hal: (1) kualitas dan karakteristik lahan, (2) kualitas dan produktivitas tenaga kerja. Apabila kondisi atau karakteristik lahan relatif sama, permasalahan yang utama terletak pada produktivitas tenaga kerjanya. Perbedaan produktivitas tenaga kerja ini memang dipengaruhi oleh banyak hal, antara lain: (1) usia tenaga kerja, (2) pendidikan, (3) jenis kelamin, dan (4) pengalaman kerja.

Peternakan dan Perikanan

Sektor peternakan didominasi oleh daging babi, yang produksinya pada tahun 2007 mencapai 130.068 kg kemudian daging sapi (61.224kg) serta kerbau (2.052 kg). Produksi daging babi dan daging sapi tertinggi terdapat di Kecamatan Barong Tongkok yang masing-masing mencapai 11.235 kg dan 8.886 kg. Total produksi daging ternak terbesar di Kutai Barat terjadi di Kecamatan Barong Tongkok (20.292 kg), disusul kemudia Kecamatan Linggung Bigung (15.579 kg).

Kecamatan	Sapi			Kerbau		
	Jumlah (Ekor)	Produksi (Kg)	Produktivitas (kg/ekor)	Jumlah (Ekor)	Produksi (Kg)	Produktivitas (kg/ekor)
Bongan	468	3,575	8	57	342	6
Jempang	421	2,574	6	36	171	5
Penyinggahan	45	858	19	-	-	-
Muara Pahu	301	2,145	7	12	-	-
Muara Lawa	370	2,145	6	31	342	11
Damai	162	1,859	11	16	171	11
Barong Tongkok	673	8,886	13	4	171	43
Melak	588	7,150	12	8	-	-
Long Iram	395	5,148	13	-	-	-
Long Hubung	136	1,287	9	-	-	-
Long Bagun	52	1,001	19	-	-	-
Long Pahangai	113	1,573	14	-	-	-
Long Apari	-	-	-	-	-	-
Bentian Besar	133	1,573	12	217	171	1
Linggung Bigung	576	7,293	13	5	342	68
Silug Ngurai	182	1,573	9	57	-	-
Nyuatan	159	1,716	11	7	171	24
Sekolaq Darat	577	3,861	7	9	171	19
Manor Bulatn	321	1,573	5	2	-	-
Tering	418	4,719	11	-	-	-
Laham	44	715	16	-	-	-
TOTAL	6,134	61,224	10	461	2,052	4

Kecamatan	Kambing		Babi			Total Produksi (Kg)
	Jumlah (Ekor)	Produksi (Kg)	Jumlah (Ekor)	Produksi (Kg)	Produktivitas (kg/ekor)	
Bongan	520	-	1,051	6,282	5.98	10,199
Jempang	226	-	1,903	6,980	3.67	9,725
Penyinggahan	77	-	-	-	-	858
Muara Pahu	164	-	362	3,291	9.09	5,436
Muara Lawa	80	-	2,269	7,080	3.12	9,567
Damai	109	-	2,484	7,678	3.09	9,708
Barong Tongkok	590	-	4,521	11,235	2.49	20,292
Melak	167	-	708	5,385	7.61	12,535
Long Iram	118	-	293	4,753	16.22	9,901
Long Hubung	83	-	1,316	8,144	6.19	9,431
Long Bagun	45	-	891	5,618	6.31	6,619
Long Pahangai	56	-	942	5,352	5.68	6,925
Long Apari	44	-	188	2,626	13.97	-
Bentian Besar	105	-	1,186	7,213	6.08	8,957
Linggang Bigung	377	-	1,960	7,944	4.05	15,579
Siluq Ngurai	42	-	2,434	7,147	2.94	8,720
Nyuatan	113	-	1,519	6,316	4.16	8,203
Sekolaq Darat	200	-	1,919	6,980	3.64	11,012
Manor Bulatn	138	-	1,391	6,714	4.83	8,287
Tering	91	-	1,502	7,280	4.85	11,999
Laham	57	-	768	6,050	7.88	6,765
TOTAL	3,402	-	29,607	130,068	4.39	193,344

Sumber: Diolah dari Kutai Barat dalam Angka 2008

Produksi unggas masih didominasi oleh ayam potong, yang total produksinya pada tahun 2007 mencapai 287.542 kg. Dari jumlah ini, produksi terbesar terjadi di kecamatan Melak (66.706 kg), Linggang Bigung (49.704 kg), dan Long Iram (42.510 kg). Untuk produksi ayam buras dan itik relatif tidak besar. Total produksi ayam buras pada tahun 2007 mencapai 54.667 kg, sedangkan itik hanya mencapai 2.356 kg. Produksi ayam buras terbesar terdapat di Kecamatan Melak (7.383 kg), kemudian Barong Tongkok (7.314 kg), Bongan (6.003 kg), dan Linggang Bigung (5.451 kg).

Kecamatan	Ayam Buras (Kg)	Ayam Potong (Kg)	Itik (Kg)	Total (Kg)
Bongan	6,003	3,488	214	9,705
Jempang	2,227	8,502	54	10,783
Penyenggahan	1,725	1,526	54	3,305
Muara Pahu	1,863	1,962	54	3,879
Muara Lawa	1,863	8,066	107	10,036
Damai	1,587	2,616	107	4,310
Barong Tongkok	7,314	33,354	428	41,096
Melak	7,383	66,708	428	74,519
Long Iram	2,139	42,510	107	44,756
Long Hubung	1,794	2,180	0	3,974
Long Bagun	1,725	2,834	0	4,559
Long Pahangai	1,173	872	0	2,045
Long Apari	828	436	0	1,264
Bentian Besar	966	1,090	0	2,056
Linggang Bigung	5,451	49,704	214	55,369
Siluq Ngurai	1,518	2,398	107	4,023
Nyuatan	1,449	3,052	54	4,555
Sekolaq Darat	1,794	17,876	107	19,777
Manor Bulatn	1,656	9,592	107	11,355
Tering	2,553	27,468	214	30,235
Laham	1,656	1,308	0	2,964
Total	54,667	287,542	2,356	344,565

Sumber: Diolah dari Kutai Barat dalam Angka 2008

Kecamatan Melak merupakan kecamatan yang memiliki total produksi unggas terbesar (74.519 kg) atau sebesar 21,6% dari total produksi daging unggas di Kutai Barat.

Dalam hal perikanan, sebagian besar berasal dari sungai dan danau dengan total areal penangkapan 20.429,3 ha. Dari jumlah tersebut, areal penangkapan terbesar terdapat di Kecamatan Jempang (12.497 ha), disusul kemudian Kecamatan Damai (4.379 ha). Media penangkapan ikan menggunakan 2 alat, yaitu perahu tanpa motor dan motor tempel. Jumlah perahu dan motor tempel terbanyak terdapat di Kecamatan Muara Pahu yaitu 1.835 unit, meski luas areal penangkapan hanya 506 ha, atau terdapat 3,63 perahu untuk setiap hektar. Kondisinya jauh berbeda dengan Kecamatan Jempang dengan areal penangkapan ikan terluas namun hanya memiliki 1.767 perahu, atau setiap hektar hanya terdapat 0,14 perahu atau dengan kata lain terdapat 1 perahu untuk setiap 7,14 ha.

Kecamatan	Jumlah Sarana Penangkapan Ikan(unit)		Jumlah (unit)	Luas Area (Ha)	Perbandingan Jumlah Perahu (unit) dengan Luas Area (ha)
	Perahu Tanpa Motor	Motor Tempel			
Bongan	80	62	142	63	2.25
Jempang	955	812	1,767	12,497	0.14
Penyinggahan	795	825	1,620	1,245	1.30
Muara Pahu	1,021	814	1,835	506	3.63
Muara Lawa	122	44	166	214	0.78
Damai	146	65	211	3,480	0.06
Barong Tongkok	148	36	184	200	0.92
Melak	189	288	477	446	1.07
Long Iram	109	146	255	135	1.89
Long Hubung	78	105	183	237	0.77
Long Bagun	58	55	113	74	1.54
Long Pahangai	50	53	103	157	0.66
Long Apari	7	30	37	96	0.39
Bentian Besar	79	-	79	75	1.05
Linggang Bigung	-	-	-	-	-
Siluq Ngurai	11	-	11	140	0.08
Nyuatan	5	-	5	-	-
Sekolaq Darat	5	-	5	40	0.13
Manor Bulatn	102	292	394	719	0.55
Tering	85	240	325	107	3.04
Laham	25	48	73	-	-
TOTAL	4,070	3,915	7,985	20,429	0.39

Sumber: Diolah dari Kutai Barat dalam Angka 2008

Dari sisi produksi, produksi 2007 dari perairan umum sebanyak 895,1 ton dengan nilai Rp9,5 milyar sedangkan dari kolam dan keramba 340,3 ton dengan nilai Rp5 milyar.

Kehutanan dan Pertambangan

Produksi kehutanan dalam bentuk kayu sebagian besar berupa kayu meranti. Dari total produksi tahun 2007 sebanyak 309.568,83m³, produksi kayu meranti mencapai 230.661,15m³ atau 74,5%. Jumlah produksi kayu berdasarkan hitungan setiap tahun mengalami penurunan 25,1%. Data juga menunjukkan bahwa penurunan terbesar terjadi pada tahun 2006-2007. Kayu meranti yang mendominasi jumlah produksi, mengalami penurunan yang paling kecil. Penurunan jumlah produksi ini dipengaruhi oleh menurunnya luas tebangan, dari 22.367,17 ha pada tahun 2004 menjadi 17.405,54 ha pada tahun 2007. Jumlah perusahaan kayu di Kutai Barat adalah 23 perusahaan. Sebagian dari jumlah tersebut atau sebanyak 8 perusahaan berada di Kecamatan Long Bagun. Di Kecamatan Damai terdapat 6 perusahaan.

Untuk sektor pertambangan, terdapat 3 jenis pertambangan yang dominan yaitu emas, perak, serta batu bara. Data pertambangan tahun 2005 menunjukkan bahwa produksi emas mencapai 1,68 ton dan perak mencapai 1,26 ton. Produksi ini jauh menurun dibandingkan jumlah produksi pada tahun 2004 yang mencapai 10,019 ton untuk emas dan 9,032 ton untuk perak. Keadaan yang berbeda

terjadi untuk produksi batu bara yang justru menunjukkan peningkatan setiap tahun. Pada tahun 2005 produksi batu bara mencapai 3.888.374 dan meningkat menjadi 10.728.500 atau naik sekitar 176% namun mengalami penurunan drastis pada tahun 2007 menjadi 7.791.241 atau turun sebesar 27% dibanding tahun 2006.

Tinjauan PDRB Kutai Barat

Dilihat dari struktur PDRB, Sektor Pertanian, Pertambangan dan Penggalian, serta Sektor Bangunan merupakan 3 sektor yang memberikan sumbangan terbesar dalam PDRB Kutai Barat. Dari ketiga sektor terbesar tersebut, sektor pertambangan dan penggalian merupakan sektor yang memberikan kontribusi terbesar dalam PDRB. Hampir 50% PDRB Kutai Barat sangat tergantung pada sektor ini. Subsektor yang berperan penting di sektor ini adalah subsektor pertambangan non migas khususnya batu bara, emas, dan perak. Untuk sektor pertanian, subsektor yang berperan penting adalah subsektor kehutanan. Demikian pula dengan sektor industri pengolahan, subsektor yang berperan penting adalah subsektor barang kayu dan hasil hutan.

Lapangan Usaha	2000	2003	2004	2005	2006	2007	Rata-rata Pertumbuhan
Pertanian	442,233.73	512,554.88	485,855.65	499,094.52	518,836.13	531,279.04	2.655
Pertambangan dan Penggalian	651,320.96	980,129.22	1,054,371.27	1,177,978.94	1,232,640.86	1,286,564.33	10.213
Industri Pengolahan	35,778.26	43,739.66	48,990.79	50,889.96	55,243.39	61,970.88	8.164
Listrik, Gas, dan Air Minum	2,792.06	3,495.24	6,271.78	6,482.86	6,323.25	6,362.98	12.488
Bangunan	158,888.25	239,928.78	259,209.00	289,083.91	328,240.17	376,118.20	13.100
Perdagangan, Hotel, dan Restoran	107,953.83	154,080.12	172,186.03	178,226.49	191,391.40	211,569.70	10.089
Pengangkutan dan Komunikasi	24,010.21	30,240.16	32,178.38	33,656.53	37,399.29	40,479.44	7.747
Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan	32,331.89	46,413.05	54,226.88	55,980.18	58,652.87	64,583.73	10.389
Jasa-jasa	55,748.80	72,002.79	82,505.23	84,700.36	93,071.82	105,603.81	9.556
PDRB	1,511,057.99	2,082,583.90	2,195,795.01	2,376,093.75	2,521,799.18	2,684,532.11	8.556

Sumber: Diolah dari Kutai Barat dalam Angka 2008

Dilihat dari rata-rata pertumbuhan tiap tahun dari 2000 sampai 2007, sektor bangunan merupakan sektor dengan rata-rata pertumbuhan tiap tahun tertinggi (13,1%), sedangkan sektor pertanian memiliki rata-rata pertumbuhan tiap tahun yang terendah (2,65%). Secara makro, PDRB Kutai Barat memiliki rata-rata pertumbuhan tiap tahun sebesar 8,56%. Hanya 3 sektor yang memiliki rata-rata pertumbuhan tiap tahun di bawah rata-rata pertumbuhan tiap tahun Kutai Barat, yaitu sektor pertanian, industri pengolahan, serta sektor pengangkutan dan komunikasi.

Tinjauan terhadap struktur ekonomi menunjukkan bahwa sektor ini masih didominasi oleh sektor primer yang terdiri dari sektor pertanian serta sektor pertambangan dan penggalian. Sekitar 70% PDRB Kutai Barat dipengaruhi oleh sektor ini. Di sisi lain, sektor pertambangan dan penggalian merupakan jenis sektor ekonomi yang tidak bisa diperbarui. Oleh karena itu, upaya pengelolaan sektor ini menjadi hal yang sangat penting dalam jangka panjang.

Meskipun sektor primer mendominasi PDRB Kutai Barat, namun perhitungan rata-rata pertumbuhan menunjukkan bahwa sektor sekunder merupakan sektor yang memiliki rata-rata pertumbuhan tiap tahun tertinggi, yaitu sebesar 12,3%.

Data proporsi PDRB secara sektoral juga menunjukkan bahwa perekonomian Kutai Barat masih didominasi oleh sektor primer. Dilihat dari komposisi yang ada, dominasi ini dalam jangka panjang akan sulit untuk bergeser mengingat kondisi sumberdaya alam dan lingkungan Kutai Barat. Berdasarkan data yang ada terlihat bahwa proporsi sektor pertanian dari tahun ke tahun semakin mengecil meski masih tergolong besar. Sektor pertambangan dan penggalan meski berfluktuasi namun terlihat mengalami peningkatan.

Lapangan Usaha	2000	2003	2004	2005	2006	2007
Pertanian	29.27	24.61	22.13	21.00	20.57	19.79
Pertambangan dan Penggalan	43.10	47.06	48.02	49.58	48.88	47.93
Industri Pengolahan	2.37	2.10	2.23	2.14	2.19	2.31
Listrik, Gas, dan Air Minum	0.18	0.17	0.29	0.27	0.25	0.24
Bangunan	10.52	11.52	11.80	12.17	13.02	14.01
Perdagangan, Hotel, dan Restoran	7.14	7.40	7.84	7.50	7.59	7.88
Pengangkutan dan Komunikasi	1.59	1.45	1.47	1.42	1.48	1.51
Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan	2.14	2.23	2.47	2.36	2.33	2.41
Jasa-jasa	3.69	3.46	3.76	3.56	3.69	3.93
PDRB	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Sumber: Diolah dari Kutai Barat dalam Angka 2008

Beberapa sektor yang terlihat konstan proporsinya seperti industri pengolahan; listrik, gas dan air minum; perdagangan, hotel dan restoran, pengangkutan dan komunikasi; keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan, serta sektor jasa-jasa. Sektor yang secara konsisten selalu meningkat proporsinya adalah sektor bangunan.

HASIL ANALISIS

Analisis Potensi Ekonomi

Berdasarkan hasil kajian data yang bersumber dari Kutai Barat dalam Angka 2008, maka diperoleh potret potensi ekonomi wilayah sebagai berikut:

Jenis Barang/Komoditas	Wilayah Potensial
Padi	Damai, Long Iram, Long Hubung, Laham, Nyuatan
Karet	Barong Tongkok, Linggang Bigung, Sekolaq Darat, Manor Bulatn, Melak
Lada	Kinggang Bigung, Barong Tongkok, Bongan, Long Bagun, Melak
Kopi	Linggang Bigung, Damai, Long Hubung, Bongan, Jempang
Kelapa	Long Pahangai, Jempang, Barong Tongkok, Bongan, Muara Pahu
Kakao	Long Hubung, Long Iram, Tering
Kapuk	Bongan, Barong Tongkok
Kemiri	Nyuatan, Sekolaq Darat, Damai, Manor Bulatn, Bongan, Linggang Bigung
Aren	Penyinggahan, Damai, Manor Bulatn
Jahe	Damai
Panili dan Pinang	Nyuatan
Perikanan	Jempang, damai, Penyinggahan, Manor Bulatn, Muara Pahu
Peternakan	Long Apari, Barong Tongkok, Linggang Bigung, Melak, Tering

Sumber: Diolah dari Kutai Barat dalam Angka

Data tersebut mengandung arti bahwa potensi ekonomi di masing-masing wilayah kecamatan berbeda-beda. Hal sangat dipengaruhi oleh kondisi geografis, demografis, serta kultural masing-masing kecamatan. Apabila data di atas dipergunakan sebagai salah satu pertimbangan untuk menyusun strategi, akan lebih optimal apabila pemda membuat pemetaan kecamatan yang lebih detil, serta fokus pada potensi masing-masing kecamatan. Hal ini diyakini akan mempercepat proses pertumbuhan ekonomi wilayah, serta mampu mengefektivkan kebijakan ADK dan UBK yang telah ditempuh selama ini. Dana ADK dan UBK yang ada seyogyanya diarahkan pada kegiatan yang memberi *multiplier effect* besar. Kegiatan-kegiatan ADK dan UBK akan lebih optimal apabila diarahkan pada potensi ekonomi masing-masing wilayah. Hal ini akan menjadikan ADK dan UBK sebagai faktor pendorong pertumbuhan ekonomi wilayah, yang pada akhirnya diharapkan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Analisis Pemetaan Potensi Wilayah

Apabila kebijakan UBK/ADK didasarkan pada kriteria tersebut, diharapkan pemerintah daerah Kutai Barat lebih mudah memfokuskan diri pada pembangunan yang menjadikan wilayah sebagai pusat-pusat pertumbuhan. Hasil perhitungan pemetaan wilayah dengan menggunakan metodologi di atas adalah sebagai berikut:

Kecamatan	Indikator Sosial Ekonomi (20%)						Jumlah
	Pendidikan	Kesehatan	Penerangan	Bangunan	Keluarga Pra Sejahtera	Kepadatan	
Bongan	5	3	1	1	1	1	12
Jempang	5	3	3	3	5	5	24
Penyinggahan	1	1	3	3	1		9
Muara Pahu	5	1	1	3	5	5	20
Muara Lawa	3	3	3	3	1	5	18
Damai	5	1	5	3	3	3	20
Barong Tongkok	5	5	5	5	3	5	28
Melak	5	1	5	5	3	5	24
Long Iram	5	1	1	5	5	3	20
Long Hubung	5	3	1	5	1	5	20
Long Bagun	5	3	1	1	3	1	14
Long Pahangai	3	1	1	1	1	1	8
Long Apari	1	3	1	3	3	1	12
Bentian Besar	1	1	1	5	1	1	10
Linggang Bigung	5	5	5	3	5	5	28
Siluq Ngurai	5	3	1	5	5	1	20
Nyuatan	3	1	5	1	3	1	14
Sekolaq Darat	1	5	5	5	3	5	24
Manor Bulatn	5	1	3	3	5	3	20
Tering	5	5	3	3	5	3	24
Laham	1	1	1	3	3	1	10

Sumber: Diolah dari Kutai Barat Dalam Angka 2008

Kecamatan	Indikator Aktivitas Ekonomi Wilayah (50%)							Jumlah
	Hotel/Pe nginapan	Lokasi Pasar/To ko	Warung/ Kelonton g	Warung makan	Restoran	koperasi	Perahu/ Luas	
Bongan	3	1	3	5	5	5	5	27
Jempang	5	3	5	5	3	5	1	27
Penyingsahan	1	1	1	1	1	3	3	11
Muara Pahu	3	1	5	3	1	1	5	19
Muara Lawa	5	1	3	3	5	3	1	21
Damai	3	3	3	1	1	1	1	13
Barong Tongkok	3	3	5	5	5	5	1	27
Melak	5	5	3	5	3	3	3	27
Long Iram	3	1	3	3	1	3	3	17
Long Hubung	3	3	3	1	1	3	1	15
Long Bagun	5	1	5	3	1	5	3	23
Long Pahangai	3	1	1	1	1	1	1	9
Long Apari	3	1	1	3	1	3	1	13
Bentian Besar	1	1	1	1	1	3	3	11
Linggang Bigung	1	1	1	3	3	5	1	15
Silug Ngurai	1	1	3	1	1	3	1	11
Nyuatan	1	1	1	3	3	5	1	15
Sekolaq Darat	1	1	3	1	1	3	1	11
Manor Bulatn	1	1	1	5	1	5	1	15
Tering	1	1	5	5	1	5	5	23
Laham	1	1	1	1	1	3	1	9

Sumber: Diolah dari Kutai Barat Dalam Angka 2008

Kecamatan	Indikator Potensi Ekonomi Wilayah (30%)					Jumlah	Bobot Akhir
	Luas Areal	Produksi Perkebun an	produksi ternak	Perikanan	Produksi Padi		
Bongan	5	5	5	1	5	21	22.2
Jempang	5	5	5	5	1	21	24.6
Penyingsahan	5	3	1	5	1	15	11.8
Muara Pahu	5	3	1	3	1	13	17.4
Muara Lawa	5	5	3	1	3	17	19.2
Damai	5	5	3	5	5	23	17.4
Barong Tongkok	1	1	5	1	5	13	23
Melak	5	5	5	1	1	17	23.4
Long Iram	3	3	3	1	5	15	17
Long Hubung	3	5	3	1	5	17	16.6
Long Bagun	3	3	1	1	5	13	18.2
Long Pahangai	1	1	1	1	3	7	8.2
Long Apari	1	1	1	1	3	7	11
Bentian Besar	1	1	3	1	3	9	10.2
Linggang Bigung	1	1	5	1	1	9	15.8
Silug Ngurai	1	1	3	1	1	7	11.6
Nyuatan	5	5	3	1	5	19	16
Sekolaq Darat	5	3	5	1	1	15	14.8
Manor Bulatn	5	5	3	3	3	19	17.2
Tering	1	1	5	1	3	11	19.6
Laham	5	5	1	1	5	17	11.6

Sumber: Diolah dari Kutai Barat Dalam Angka 2008

Berdasarkan perhitungan di atas, akan dibuat klasifikasi wilayah berdasarkan pertimbangan nilai terendah dan tertinggi, rata-rata hitung, serta simpangan baku. Hasil dari pengolahan lebih lanjut menghasilkan klasifikasi wilayah sebagai berikut:

Kecamatan	Bobot Akhir	Kriteria
Long Pahangai	8.2	TUMBUH
Bentian Besar	10.2	
Long Apari	11	
Silug Ngurai	11.6	
Laham	11.6	
Penyinggahan	11.8	
Sekolaq Darat	14.8	BERKEMBANG
Linggang Bigung	15.8	
Nyuatan	16	
Long Hubung	16.6	
Long Iram	17	
Manor Bulatn	17.2	
Muara Pahu	17.4	
Damai	17.4	
Long Bagun	18.2	
Muara Lawa	19.2	
Tering	19.6	
Bongan	22.2	MAJU
Barong Tongkok	23	
Melak	23.4	
Jempang	24.6	

Tertinggi	24.6
Terendah	8.2
Mean	16.51
Std. Dev	4.60

Hasil akhir dari perhitungan menunjukkan bahwa dari jumlah wilayah yang ada, terdapat 4 wilayah yang masuk dalam kategori maju, 8 wilayah masuk dalam klasifikasi berkembang, dan 6 wilayah masuk dalam klasifikasi tumbuh. Suatu wilayah dikatakan masuk dalam klasifikasi maju apabila jumlah total poin di atas 20, klasifikasi berkembang apabila jumlah poin antara 12 dan 20, serta tumbuh apabila jumlah poin di bawah 12. Metodologi dan perhitungan di atas masih sangat memungkinkan dikembangkan dan disempurnakan lebih jauh, namun secara substansial adalah perlunya pemerintah daerah membuat klasifikasi sektor-sektor strategis di masing-masing wilayah. Selain untuk menyusun strategi dan kebijakan pembangunan daerah, pemetaan wilayah juga berguna untuk penyempurnaan kebijakan alokasi UBK/ADK.

Ada dua pendekatan yang bisa dipergunakan dalam kebijakan UBK/ADK berdasarkan informasi potensi wilayah. Pertama, wilayah yang maju diberi alokasi yang lebih tinggi dibandingkan wilayah yang berkembang atau tumbuh untuk memantapkan perannya dalam pembangunan daerah, dan kedua, wilayah yang tumbuh justru diberi alokasi dana UBK/ADK yang lebih tinggi dibandingkan wilayah yang lebih maju. Apabila prioritas pemerintah daerah adalah tingkat pengembalian dana yang lebih terjamin, alternatif pertama bisa ditempuh. Namun, apabila prioritas utama adalah misi pemerintah untuk mengurangi tingkat ketimpangan antar wilayah yang mungkin muncul, alternatif

kedua bisa dilaksanakan, meski dengan risiko kemungkinan munculnya permasalahan dalam alokasi penggunaan dana UBK/ADK oleh masyarakat.

ADK dan UBK dalam Pembangunan Ekonomi

Kebijakan pengembangan ekonomi masyarakat dilaksanakan oleh pemerintah daerah melalui kebijakan Usaha Bersama Kampung (UBK) dan Alokasi Dana Kampung (ADK). Kebijakan tersebut ditempuh sebagai implementasi dari visi dan misi Kutai Barat untuk pemberdayaan masyarakat dalam aktivitas ekonomi. Setiap kampung diberi dana Rp100 juta melalui pengelola UBK atau pengurus kampung.

Kebijakan tersebut merupakan wujud pengembangan ekonomi kerakyatan, namun perlu diteliti dikaji secara mendalam dan komprehensif efektivitasnya. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa mekanisme penggunaan dan pelaporan dana UBK dan ADK belum sepenuhnya mencerminkan misi pemerintah daerah untuk memberdayakan masyarakat.

Implementasi UBK dan ADK yang telah dilaksanakan menunjukkan masih lemahnya keterkaitan kebijakan tersebut dengan upaya mendorong perekonomian masyarakat khususnya UKM. Berdasarkan pelaksanaan UBK dan ADK yang dilaksanakan pada tahun 2005 dan 2006, tercermin hal-hal sebagai berikut:

- a. Dana ADK dialokasikan untuk pembangunan fisik di masing-masing kampung
- b. Dana UBK dialokasikan untuk kegiatan simpan-pinjam masyarakat.
- c. Dana UBK belum mampu menarik dana swadaya masyarakat.
- d. Penelitian di beberapa kampung dari 8 kecamatan menunjukkan bahwa masyarakat belum memahami implementasi dana UBK, sehingga beberapa kampung tidak mampu menimplementasikan dana UBK secara optimal.
- e. Dana UBK tidak dikaitkan dengan prioritas program pembangunan daerah sehingga aspek *linkage*-nya sangat lemah.
- f. Aspek keberlanjutan pengelolaan dana UBK tidak dijelaskan secara teknis dan konsep, sehingga aspek pertanggungjawaban pengelolaan dana lemah
- g. Keterlibatan instansi terkait dalam UBK kurang menonjol, sehingga efektivitas implementasi dana tidak nampak.
- h. Penggunaan dana ADK tidak berjalan beriringan dengan UBK sehingga program ADK dan UBK tidak berjalan secara sinergis.
- i. Alokasi dana UBK tidak didasarkan pada potensi masing-masing kecamatan atau kampung, namun menggunakan konsep pukul rata.

Kondisi di atas dapat menimbulkan potensi permasalahan di Kutai Barat. Setidak-tidaknya, permasalahan tersebut menyangkut efektivitas alokasi dana ADK dan UBK, yang pada akhirnya dapat berdampak pada pembangunan ekonomi di Kutai Barat.

Wilayah yang potensial adalah wilayah yang memiliki kinerja ekonomi, sosial, dan pengelolaan sumberdaya alam yang optimal. Kebijakan ADK dan UBK yang selama ini dilaksanakan belum didasarkan pada pertimbangan kondisi masing-masing wilayah yang memang berbeda-beda namun dianggap semua wilayah adalah sama. Kondisi seperti ini memungkinkan munculnya masalah di setiap wilayah karena ketidaksinkronan antara alokasi dana ADK dan UBK dengan potensi yang bisa dikembangkan oleh masing-masing wilayah.

Berdasarkan penelitian Bappeda Kutai Barat dan CERD Tahun 2008, efisiensi dan efektivitas dana UBK belum nampak. Hal ini terlihat dari: (1) jenis kegiatan yang dilakukan, (2) keterlibatan

instansi terkait, (3) manfaat dana, serta (4) keberlanjutan. Penelitian tersebut memberikan kesimpulan yang sama untuk semua kampung. Penelitian dilakukan terhadap sampel 7 kecamatan dengan jumlah kampung sebanyak 28 kampung. Penelitian yang dilakukan untuk UBK 2005 dan 2006 tersebut menunjukkan tidak adanya perubahan dana UBK, baik ditinjau dari besar dana, mekanisme, alokasi dana, manfaat, dan sebagainya.

Kecamatan	Kampung	Besar Dana	Jenis Kegiatan	Teknis Operasional	Keberlanjutan	Manfaat
Long Bagun	Mamahak Besar Ilir	Rp100.000.000	Simpan pinjam	Diambil langsung dan dipergunakan sesuai kesepakatan warga dan tidak ada dana swadaya	Dana tidak selalu dimanfaatkan anggota	Kemampuan menabung dan daya beli tidak lebih baik
	Rukun Damai					
Linggang Bigung	Linggang Melapeh	Rp100.000.000	Simpan pinjam	Diambil langsung dan dipergunakan sesuai kesepakatan warga dan tidak ada dana swadaya	Dana tidak selalu dimanfaatkan anggota	Kemampuan menabung dan daya beli tidak lebih baik
	Bigung Baru					
	Tutung					
	Melapeh Baru					
	Linggang Mapan					
	Linggang Bigung					
	Linggang Amer					
	Bangun Sari					
Purwodadi						
Barong Tongkok	Juhan Asa	Rp100.000.000	Simpan pinjam	Diambil langsung dan dipergunakan sesuai kesepakatan warga dan tidak ada dana swadaya	Dana tidak selalu dimanfaatkan anggota	Kemampuan menabung dan daya beli tidak lebih baik
	Asa					
	Muara Asa					
	Ombau Asa					
	Ngenyam Asa					
	Geleo Asa					
	Sendawar					
Balok Asa						
Melak	Bunyut	Rp100.000.000	Simpan pinjam	Diambil langsung dan dipergunakan sesuai kesepakatan warga dan tidak ada dana swadaya	Dana tidak selalu dimanfaatkan anggota	Kemampuan menabung dan daya beli tidak lebih baik
	Muara Benangaq					
Sekolaq Darat	Sumber Bangun	Rp100.000.000	Simpan pinjam	Diambil langsung dan dipergunakan sesuai kesepakatan warga dan tidak ada dana swadaya	Dana tidak selalu dimanfaatkan anggota	Kemampuan menabung dan daya beli tidak lebih baik
Muara Lawa	Lambing	Rp100.000.000	Simpan pinjam	Diambil langsung dan dipergunakan sesuai kesepakatan warga dan tidak ada dana swadaya	Dana tidak selalu dimanfaatkan anggota	Kemampuan menabung dan daya beli tidak lebih baik
	Benggeris					
Bongan	Gerusung	Rp100.000.000	Simpan pinjam	Diambil langsung dan dipergunakan sesuai kesepakatan warga dan tidak ada dana swadaya	Dana tidak selalu dimanfaatkan anggota	Kemampuan menabung dan daya beli tidak lebih baik
	Pereng Taliq					
	Resak					
	Muara Siram I					

Sumber: Diolah dari Bappeda dan CERD, 2008

Efektivitas UBK belum terlihat jelas sehingga sulit diketahui sejauh mana dana UBK beserta aktivitas ekonomi mampu memberikan manfaat bagi masyarakat. Seandainya bermanfaat, manfaat tersebut belum tentu membawa dampak ekonomi wilayah atau daerah karena sulit untuk mendeteksi penggunaan dana simpan pinjam tersebut. Bisa saja untuk kegiatan konsumtif, atau kegiatan yang berdampak kecil terhadap kesejahteraan masyarakat. Ketiadaan swadaya masyarakat dalam UBK juga menyebabkan kurangnya motivasi dan tanggung jawab masyarakat untuk pengembangan UBK. Secara psikologis, masyarakat tidak memiliki beban seandainya dana tersebut bermasalah karena mereka berpendapat dana tersebut merupakan murni uang pemerintah. Hal ini juga berdampak pada kurang jelasnya fungsi dan peran instansi terkait.

Dana ADK juga menghadapi permasalahan, meski masih nampak wujudnya. Berdasarkan studi yang juga dilaksanakan oleh Bappeda dan CERD pada tahun 2008, dana ADK dialokasikan untuk pembangunan fisik dan pengembangan aparatur desa. Pembangunan fisik dari dana tersebut ternyata tidak berkorelasi positif dengan kualitas kinerja aparatur kampung, meski jenis pembangunan fisik sesuai dengan kebutuhan kampung. Alokasi dana ADK akan lebih optimal apabila mampu mendukung UBK.

Alokasi dana UBK dan/atau ADK selama ini tidak didasarkan pada kondisi wilayah, namun dipukul rata. Dari sudut pandang keadilan, kebijakan seperti ini justru tidak adil karena bagaimanapun kondisi kampung, semua mendapatkan dana yang sama besarnya, padahal kondisi kampung sangat berbeda dalam hal: (1) luas wilayah, (2) jumlah penduduk, (3) sarana dan prasarana pendukung, (4) geografis, (5) sumber daya manusia, (6) potensi dan permasalahan kampung, dan (7) kondisi sosial ekonomi masyarakat kampung.

Apabila dipandang memungkinkan dari semua sisi, akan lebih baik apabila alokasi dana UBK/ADK didasarkan pada kondisi wilayah. Dijadikannya kondisi wilayah sebagai bagian dari pertimbangan alokasi dana UBK/ADK didasarkan pada hal-hal berikut: (1) alokasi dana UBK/ADK akan lebih efektif apabila pemerintah daerah memahami potensi dan permasalahan di masing-masing wilayah. Dana UBK/ADK akan mampu menjadi faktor pemicu aktivitas ekonomi masyarakat, (2) pemetaan wilayah akan memudahkan kontrol bagi pemerintah untuk melihat efektivitas dana UBK/ADK serta proses monitoring dan evaluasi penggunaan dana UBK/ADK, (3) pemerintah dapat menyusun kebijakan ekonomi daerah secara lebih fokus dengan menjadikan wilayah sebagai pusat pertumbuhan.

SIMPULAN DAN ALTERNATIF REKOMENDASI

Melihat potensi sumberdaya alam dan potensi masyarakat yang ada, pembangunan Kutai Barat diyakini mampu membawa kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, berbagai strategi dan kebijakan yang diambil harus didasarkan pada permasalahan dan potensi masing-masing wilayah. Penyusunan wilayah-wilayah sebagai pusat pengemebangan merupakan strategi yang tepat dalam rangka percepatan pertumbuhan dan pemerataan.

Kebijakan UBK/ADK diarahkan untuk mencapai tujuan tersebut. Kebijakan UBK/ADK meskipun tujuan program tersebut sesuai dengan visi dan misi Kutai Barat, namun dalam implementasinya kurang berjalan efektif karena kebijakan tersebut kurang menyentuh permasalahan dan potensi masing-masing wilayah, serta mekanisme monitoring dan evaluasi yang belum berjalan secara optimal.

Beberapa hal yang diperlukan agar implementasi UDK/ADK berjalan optimal antara lain:

- a. Perlu dipertimbangkan agar alokasi dana UBK/ADK tidak “pukul rata” untuk setiap kampung. Masing-masing kampung di setiap wilayah memiliki karakteristik, permasalahan, dan potensi yang berbeda-beda. Untuk itu, diperlukan studi yang mampu memotret permasalahan dan potensi setiap kampung dalam konteks pembangunan ekonomi. Hal ini diharapkan akan menjadikan program UBK/ADK lebih efektif dalam mencapai sasaran yang dituju. Aparat kecamatan dan dinas terkait sangat penting untuk dilibatkan, karena mereka adalah orang-orang yang diharapkan memahami dengan baik kondisi wilayah beserta potensi ekonomi yang ada.
- b. Agar implementasi berjalan dengan lancar, diperlukan mekanisme pembinaan serta monitoring dan evaluasi yang jelas. Monitoring meliputi kontrol terhadap penggunaan dana agar sesuai dengan tujuan, sedangkan evaluasi untuk melihat *output*, *outcome*, dan *impact* dari kegiatan yang dijalankan melalui program UBK/ADK. Sedapat mungkin hasil monitoring dan evaluasi dilaksanakan dengan pengukuran yang jelas, sehingga didapatkan kesimpulan yang *reasonable* dan *comparable* antar kampung.
- c. Aspek pembinaan perlu dilaksanakan oleh instansi terkait, dan jika diperlukan dapat dilaksanakan melalui kerjasama dengan LSM, konsultan, atau perguruan tinggi. Hal ini perlu dilakukan agar implementasi program berjalan sesuai dengan arah yang telah dirumuskan.
- d. Keterlibatan masyarakat secara aktif dalam bentuk penyertaan dana swadaya perlu dilaksanakan. Hal ini untuk menciptakan kondisi psikologis bahwa dana UBK/ADK adalah dana masyarakat sendiri yang perlu dikelola secara hati-hati dan penuh tanggung jawab. Studi yang dilakukan oleh CERD tentang persepsi UBK/ADK di mata masyarakat menunjukkan bahwa masyarakat menganggap dana UBK/ADK seperti “durian runtuh”. Mereka beranggapan hal tersebut sebagai salah satu upaya pemerintah daerah meraih simpati dan popularitas masyarakat. Apabila persepsi seperti ini masih ada, sangat dimungkinkan implementasi UDK/ADK tidak berjalan sesuai visi dan misi yang ada.
- e. Sosialisasi UDK/ADK perlu dilaksanakan secara terus menerus dengan melibatkan aparat kecamatan, kampung, serta dinas terkait. Dalam sosialisasi tersebut, perlu dijelaskan berbagai hal teknis yang menyangkut UBK/ADK. Hal teknis tersebut sangat penting didokumentasikan dalam bentuk buku, termasuk di dalamnya mekanisme pembinaan serta monitoring dan evaluasi.
- f. Pelibatan koperasi dan UKM dalam pengelolaan UBK sangat penting untuk lebih menjamin bahwa implementasi UBK berjalan sesuai rencana. Dalam jangka panjang, keterlibatan koperasi dan UKM akan membawa multiplier effect yang besar dalam pembangunan ekonomi Kutai Barat yang berbasis ekonomi kerakyatan.
- g. Alokasi dana UBK/ADK perlu untuk diarahkan pada usaha ekonomi produktif. Agar komunikasi dalam pengelolaan UBK berjalan dengan baik, sangat diperlukan pertemuan rutin antar kampung untuk *sharing* tentang kendala dan tantangan yang dihadapi selama implementasi program UBK/ADK. Pertemuan tersebut dapat dilaksanakan oleh dinas atau pemerintah daerah. Selain itu, sangat dimungkinkan munculnya kerjasama antar UBK, yang diharapkan muncul dalam pertemuan-pertemuan rutin tersebut.
- h. Sebelum menerapkan strategi dan kebijakan UBK/ADK yang baru, pemerintah daerah penting untuk melakukan uji coba pada beberapa kampung dengan melibatkan dinas terkait, camat, serta aparat kampung. Hasil uji coba tersebut dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk menciptakan model pengelolaan UBK/ADK yang paling optimal. Pentingnya melakukan hal ini adalah adanya pertimbangan bahwa UBK/ADK merupakan program yang berpotensi menjadi program unggulan Kutai Barat dalam menggerakkan ekonomi masyarakat.

REFERENSI

- Anonim. "Konsep Pembangunan Ekonomi Lokal".
- Bappeda dan BPS Kutai Barat (2007). "Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kutai Barat".
- BPS Kutai Barat (2008). "Kecamatan Dalam Angka"
- BPS Kutai Barat (2008). "PDRB Kutai Barat Menurut Lapangan Usaha 2000-2007".
- BPS Kutai Barat (2008). "Kutai Barat Dalam Angka".
- Blakely, Edward J. (1994). *Planning Local Economic Development: Theory and Practice*. Sage Publications.
- CIFOR (2005). "Profil Kampung-kampung di Kabupaten Kutai Barat". Laporan Penelitian.
- Christipherson, Susan (2004). "Creative Economy Strategies for Small and Medium Size Cities: Option for New York State". *Research Paper*. Cornell University.
- Departemen Dalam Negeri dan Lembaga Administrasi Negara (2007). "Makalah Diklat Teknis Pembangunan Ekonomi Daerah". Modul 1-4.
- Eko, Sutoro (2008) "Masa Lalu, Masa Kini, dan Masa Depan otonomi Desa". *IRE*.
- Eko, Sutoro dan AAGN Ari Dwipayana (2008). "Mencari Format Otonomi Desa di Tengah Keragaman". Makalah Kerjasama IRE-Ditjen PMD. DRSP USAID.
- Hariyoga, Himawan (2007). "Kebijakan Revitalisasi Pengembangan Ekonomi Lokal". *Makalah Workshop Nasional*.
- Haug, Michaela (2007) "Kemiskinan dan Desentralisasi di Kutai Barat: Dampak Otonomi Daerah Terhadap Kesejahteraan Dayak Benuaq". *CIFOR*.
- Hutomo, Mardi Yatmo (2001). "Konsep Ekonomi Kerakyatan". Majalah PP Edisi 25.
- Info URDI Vol. 15. "Local Economic Development: Teori dan Penerapannya". Tanpa Tahun.
- Kuncoro, Mudrajad (2008)"Bab 3: Masalah Mendesak Kaltim". *Makalah*.
- Munir, Risfan (2008). "Perencanaan Pengembangan Ekonomi Lokal". *Perform Project*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 37 Tahun 2007 "Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa".

Sahdan, Gregorius, Paramita Iswari, Sunaji Zamroni (2006). "ADD Untuk Kesejahteraan Rakyat".
Forum Pengembangan Pembaharuan Desa.

Tjiptoherijanto, Prijono (2002). "Dimensi Kependudukan Dalam Pembangunan Berkelanjutan".
Majalah PP Edisi 28.